

Analisis kinerja ekonomi daerah kabupaten dan kebijakan peningkatannya di Provinsi Jambi

Sesraria Yuvanda^{1*}, Muhammad Rachmad R², Muhammad Abrar³

¹Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Jambi

^{2,3}Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Jambi

*E-mail koresponden: sesraria@gmail.com

Abstract

This study aims to identify regional economic performance by determining which regions demonstrate the best economic performance and to formulate policies for improving such performance. The research employs secondary data analysis covering nine regencies in Jambi Province over the period 2015–2024. The analytical model used is the Regional Economic Performance Index (REPI), which also serves as the basis for formulating policies to enhance regional economic performance. The results indicate that the average REPI of the nine regencies in Jambi Province is 73.37, categorized as good. Sarolangun Regency records the highest REPI at 78.39, while West Tanjung Jabung Regency has the lowest REPI at 71.29. Policy measures to improve the REPI include increasing the contribution of the industrial sector, optimizing the utilization of natural resources, controlling food distribution and production, expanding employment and business opportunities, improving the quality and skills of the labor force, and providing subsidies for basic necessities.

Keywords: *economic performance; region; policy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kinerja ekonomi daerah yang memiliki kinerja ekonomi terbaik dan merumuskan kebijakan peningkatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder terhadap 9 daerah kabupaten yang terdapat di Provinsi Jambi selama tahun 2015-2024. Model analisis yang dipakai adalah Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKED) dan untuk perumusan kebijakan peningkatan kinerja ekonomi daerah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rerata IKED 9 kabupaten di Provinsi Jambi sebesar 73,37 dengan kategori baik, dan kabupaten Sarolangun memiliki IKED terbesar sebesar 78,39 dan kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki IKED terkecil sebesar 71,29. Kebijakan peningkatan IKED berupa : peningkatan kontribusi sektor industri, pemanfaatan SDA, pengendalian distribusi dan produksi pangan, perluasan lapangan kerja dan usaha, kualitas dan keterampilan angkatan kerja, serta subsidi kebutuhan pokok.

Kata kunci : *kinerja ekonomi; daerah; kebijakan*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pembangunan ekonomi daerah ditujukan mensejahterahkan masyarakat di daerah, melalui luaran hasil Pembangunan ekonomi daerah akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat (Yuvanda, Rachmad R, & Herlin, 2025). Pembangunan ekonomi daerah terintegrasi dari pembangunan ekonomi nasional yang

dilakukan berdasarkan konsep otonomi daerah dimana manajemen sumber daya berpeluang untuk menumbuhkembangkan kinerja ekonomi daerah untuk peningkatan kemakmuran daerah (Miar et al., 2024). Namun Pembangunan ekonomi tidak cukup untuk menurunkan angka kemiskinan karena pertumbuhan yang tinggi hanya akan bermanfaat secara luas apabila diikuti dengan distribusi pendapatan yang lebih adil dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Banito et al., 2022). Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah harus mendorong peningkatan kinerja ekonomi daerah melalui berbagai kebijakan yang proaktif dalam pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

Ada kecendrungan, pemerintah daerah lebih memfokuskan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan sehingga menimbulkan Kerusakan lingkungan hidup dan mengabaikan keberlangsungan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi lalu diikuti pula oleh inflasi, pengangguran dan kemiskinan yang tinggi pula dan merugikan masyarakat daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai tidak berkualitas karena tidak berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat daerah.

Secara makro ekonomi, keberhasilan pelaksanaan ekonomi daerah pada kabupaten dapat dinilai pada capaian tingkatan indeks kinerja ekonomi daerah (IKED). Kategori keberhasilan ikut memperlihatkan kabupaten berhasil memajukan daerah dan masyarakat masyarakat daerah. Dalam IKED terdapat empat elemen kinerja ekonomi daerah berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Satu elemen berupa pertumbuhan ekonomi dapat untuk ditingkatkan tetapi empat elemen lain berupa inflasi pengangguran dan kemiskinan di upayakan untuk turunkan semaksimal mungkin. Bila ingin di tingkat IKED maka pertumbuhan ekonomi ditingkatkan di atas 5% tetapi inflasi, pengangguran dan kemiskinan harus diturunkan di bawah 5% hasilnya IKED akan menjadi Kategori di atas baik atau baik sekali

Penilaian kinerja ekonomi daerah akan lebih komprehensif bila digunakan indeks komposit yang merupakan gabungan antara capaian pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Indeks komposit tersebut lebih populer menjadi indeks kinerja ekonomi daerah (IKED) Perhitungan dan penilaian kategori ikat akan memberi hasil evaluasi terhadap kinerja ekonomi daerah yang komprehensif dan dapat dijadikan instrumen kebijakan untuk pencapaian pembangunan ekonomi yang berkualitas. Di samping itu, juga dapat dilakukan kajian yang lebih rinci guna perumusan kebijakan peningkatannya agar pembangunan ekonomi berkualitas dapat di capai

Provinsi Jambi memiliki 9 kabupaten dan 2 kota yang perlu di analisis kinerja ekonomi daerahnya agar terlihat tingkat keberhasilan dalam mendorong pembangunan daerah. Kewenangan pengelolaan sumber daya ekonomi semua kabupaten dan kota tersebut adalah sama berupa kewenangan otonomi. Dari 9 kabupaten tersebut terindikasi kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi tetapi tingkat kemiskinannya juga yang tertinggi. Sedangkan provinsi Jambi menurut (Astuti et al., 2025) memiliki rata-rata HDI dibawah rata-rata nasional dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Untuk menganalisis lebih dalam maka perlu dilakukan analisis data 10 tahun (2015 - 2024) terhadap indikator kinerja ekonomi daerah sehingga dapat pula dirumuskan kebijakan peningkatan untuk sembilan kabupaten di provinsi Jambi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data sekunder pada sembilan kabupaten yang terdapat di provinsi Jambi selama tahun 2015-2024. Di samping itu juga digunakan metode Indept guna mendalami permasalahan untuk perumusan kebijakan. Metode analisis yang digunakan dalam menentukan indeks kinerja ekonomi

daerah (IKED) berupa indeks komposit dari empat variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Adapun formulasi IKED adalah

$$IKED = \frac{PED+(1-INF)+(1-PENG)+(1-KEM)}{4} \dots\dots\dots(1)$$

Kriteria yang digunakan untuk menginterpretasi hasil perhitungan IKED dimuat pada table Berikut:

Tabel 1. Interpretasi hasil IKED

No	Hasil IKED	Kategori Interpretasi
1	<50	Tidak baik
2	51-60	Kurang baik
3	61-70	Cukup baik
4	71-80	Baik
5	81>	Sangat baik

Untuk merumuskan kebijakan peningkatan IKED maka digunakan model analisis kebijakan berbasis pada kriteria yang digunakan dalam model IKED. Adapun formulasi kebijakan dimuat pada tabel bantu berikut ini

Tabel 2. Perumusan kebijakan peningkatan IKEDD berbasis kriteria TOPSIS

No	Kriteria	Bobot	Kebijakan
1	K.1	B.1	KP.1
2	K.2	B.2	KP.2
3	K.3	B.3	KP.3
4	K.4	B.4	KP.4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan kinerja ekonomi daerah

Mengacu kepada formulasi IKED yang merupakan indeks komposit atas empat indikator yaitu pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, pengangguran dan kemiskinan maka dapat dilakukan penilaian atas kinerja ekonomi daerah terhadap sembilan kabupaten yang terdapat di provinsi Jambi. Penilai kinerja ekonomi daerah tersebut dilakukan atas rentang waktu 2015 -2024 atau 10 tahun. Untuk itu dihitung IKED dengan menggunakan nilai rata-rata selama 10 tahun untuk indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata dari keempat indikator IKED selama 10 tahun, diperoleh nilai IKED masing-masing kabupaten untuk sembilan kabupaten yang terdapat di Provinsi Jambi. Nilai IKED dari kesembilan kabupaten tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. IKED 9 Kabupaten di Provinsi Jambi (2015-2024)

No	Kabupaten	IKED
1	Batanghari	75,21
2	Bungo	72,78
3	Kerinci	73,13
4	Merangi	71,97
5	Muaro jambi	73,15
6	Sarolangon	78,39

7	Tanjab Barat	71,24
8	Tanjab Timur	71,32
9	Tebo	73,16

Sumber : Data olahan, 2025

Tabel 3 memperlihatkan bahwa secara rerata IKED untuk sembilan kabupaten di provinsi Jambi adalah sebesar 73,37 kategori baik. Sedangkan IKED per kabupaten, terlihat Sarolangoen memiliki IKED terbesar sebesar 78,39 kategori baik dan Tanjung Jabung Barat memiliki IKED terkecil sebesar 71,24 kategori baik juga. Berarti kinerja ekonomi daerah pada sembilan kabupaten di provinsi Jambi masih kategori baik dan tidak didapat IKED Kabupaten yang excelent atau kategori baik sekali untuk selama 2015 - 2024 atau satu dasawarsa terakhir.

Diperlukan kebijakan yang dapat dilakukan sembilan kabupaten di provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerahnya sehingga dapat mencapai kategori baik sekali di mana nilai IKED harus lebih besar dari 80. Kabupaten Sarolangun punya potensi untuk mencapai IKED Kategori baik sekali karena nilai IKED nya mendekati 80.

Perumusan kebijakan peningkatan IKED

Untuk merumuskan kebijakan peningkatan IKED kabupaten provinsi Jambi maka diguna kan model analisis kebijakan berbasis pada kriteria IKED. Dalam perumusan kebijakan peningkatan IKED maka digunakan pula tabel bantu berikut ini.

Tabel 3. Perumusan kebijakan peningkatan IKED

No	Kriteria	Bobot	Kebijakan peningkatan/penurunan
1	Pertumbuhan ekonomi	0,30	Meningkatkan pertumbuhan > 5% tapi berkualitas melalui peningkatan kontribusi sektor industri terbesar dalam PDRB dan pemanfaatan SDA yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan pengendalian distribusi pangan
2	Inflasi	0,27	Menurunkan Tingkat inflasi < 5% akan menjamin ketersediaan bahan pangan berkualitas melalui peningkatan produksi pangan local berkelanjutan dan pengendalian distribusi pangan
3	Pengangguran	0,23	Menurunkan Tingkat pengangguran local <5% melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja, lapangan usaha dan kualitas Angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
4	Kemiskinan	0,20	Menurunkan jumlah penduduk miskin absolut <5% melalui subsidi kebutuhan pokok, dengan pemberian bantuan usaha mandiri, dan peningkatan keterampilan kerja

Dari paparan tabel di atas terlihat bahwa kebijakan peningkatan IKED mengharuskan pemerintah kabupaten di provinsi Jambi meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas di atas 5% melalui peningkatan kontribusi sektor industri dan sektor pertambangan. Hal ini sejalan dengan (Yasmine & Badriah, 2025) perlu peningkatan

kontribusi sektor pertambangan untuk peningkatan PDRB. Disamping itu perlu juga peningkatan sektor industri melalui pengembangan agroindustri (Yuvanda, Rachmad, et al., 2025). Oleh karena itu sektor pertambangan harus berubah pengelolaannya dari sifat eksploitasi menjadi industri hilirisasi agar nilai tambah produk tambang meningkat khususnya batu bara dan migas.

Pemerintah kabupaten di provinsi Jambi juga harus menurunkan laju inflasi di bawah 5% melalui program swasembada pangan dan olahan pangan yang berkualitas. Oleh karena itu harus di optimalkan pemanfaatan lahan lokal agar produksi pangan meningkat tetapi pengendalian distribusi pangan harus dilakukan agar harga pangan terkendali dan pangan yang berkualitas tersedia. Menurut (Nofitasari et al., 2025) pemerintah bertanggung jawab terhadap penetapan harga komoditi pangan pada saat panen atau kelebihan produksi yang berdampak terhadap inflasi. Sedangkan (Helbawanti et al., 2021) menyatakan kenaikan harga pangan berdampak pada inflasi pada suatu wilayah. Chintia et al., (2022) menyatakan bahwa pemerintah perlu menjaga kestabilan harga pangan untuk menekan laju inflasi.

Penurunan laju pengangguran pada tingkat kabupaten harus di bawah 5% oleh karena itu, pemerintah kabupaten harus memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha daerah. Kemudian, pengendalian angkatan kerja harus dilakukan pula terutama alumni perguruan tinggi dan SMA/kejuruan. Jumlah dan kualitas alumni tersebut harus sesuai dengan permintaan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) agar tidak terjadi kelebihan tenaga kerja atau pengangguran. Pemerintah kabupaten harus mengkoordinir dan memfasilitasi kebijakan pengelola pendidikan dan pengelola DUDI agar semua alumni perguruan tinggi dan SLTA dapat diserap pasar tenaga kerja. Disamping itu pemerintah kabupaten juga harus mengalokasikan dana pendidikan untuk menumbuhkan pendidikan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan usaha. Menurut (Banerjee & Ghosh, 2023) pengeluaran dana pendidikan harus meningkatkan HDI (*Human Development Index*). Ini berarti peningkatan HDI akan mendorong tumbuh kembangnya lapangan kerja dan usaha oleh alumni pendidikan.

Tingkat kemiskinan pada kabupaten di provinsi Jambi harus diturunkan di bawah 5%. Untuk itu, kemiskinan absolut harus diadukan melalui subsidi kebutuhan primer penduduk miskin. Kebutuhan primer tersebut meliputi kebutuhan pokok pangan, sandang dan perumahan. Sejalan dengan (Nurafni et al., 2021) salah satu program pengentasan kemiskinan di bidang pangan berupa bantuan bersubsidi kepada rumah tangga miskin. Selanjutnya harus pula diupayakan pemberdayaan penduduk miskin melalui bantuan usaha mandiri dan peningkatan keterampilan dalam bekerja dan berusaha (Yuvanda, Rachmad R, & Jakfar, 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Retara IKED untuk 9 kabupaten di Provinsi Jambi sebesar 73,37 kategori baik. Kabupaten sarolangon memiliki IKED terbesar 78,39 kategori baik, dan Tanjung Jabung Barat memiliki IKED terkecil sebesar 71,24 kategori baik, selama tahun 2015-2024 IKED semua kabupaten di Provinsi Jambi hanya mendapat kategori baik.

Kebijakan peningkatan kinerja ekonomi daerah pada kabupaten di Provinsi Jambi berupa peningkatan kontribusi sektor industri, pemanfaatan SDA yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, pengendalian distribusi pangan, peningkatan produksi pangan local berkelanjutan, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, lapangan usaha dan kualitas angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, subsidi

kebutuhan pokok dengan pemberian bantuan usaha mandiri, dan peningkatan keterampilan kerja

Saran

Agar kinerja ekonomi daerah pada 9 kabupaten di provinsi Jambi maka pemerintah kabupaten perlu melakukan peningkatan investasi daerah karena akan mendorong peningkatan PDRB yang akhirnya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas. investasi daerah harus difokuskan pada Pembangunan industri daerah yang dapat meningkatkan nilai tambah produk tambang dan galian serta produk pertanian, pengembangan agro industri dan hilirisasi industri harus dilakukan dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi untuk industri terdekat. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pangan dan olahan pangan local untuk menekan laju inflasi serta penggunaan aneka pangan oleh Masyarakat daerah agar inflasi dapat dikendalikan. Selanjutnya menumbuhkembangkan perkebunan untuk komoditas unggulan daerah dan agro industri agar daya serap tenaga kerja meningkat dan lapangan usaha berkembang sehingga akan menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, C. P., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2025). Determinant Factors for Achieving Sustainable Development in Jambi Province. *Penanomics International Journal of Economic*, 111, 1–14.
- Banerjee, H., & Ghosh, S. (2023). The Role of Government Education Spending in Low and Lower-Middle Income Countries in a Post-Covid World. In COVID-19 Pandemic and Global Inequality: Reflections in Labour Market, Business and Social Sectors (pp. 223-244). Singapore: Springer Nature Singa. *Springer Nature Singapore*.
- Banito, F. R., Rachmad R, M., & Zulfanetti. (2022). Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Journal Paradigma Ekonomika*, 17(1). <https://doi.org/10.53978/jd.v9i1.171>
- Chintia, R. A., Destiningsih, R., Studi, P., Pembangunan, E., Tidar, U., & Magelang, K. (2022). Pengaruh harga komoditas pangan terhadap inflasi di kota semarang 1,2. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 27(2), 244–258.
- Helbawanti, O., Saputro, W. A., & Ulfa, A. N. (2021). Pengaruh harga Bahan Pangan terhadap Inflasi di Indonesia. *Jurnal Agrisaintifika*, 5(2), 107–116.
- Miar, Zakiah, W., Giovanni, J., & Cerisma, S. (2024). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Tengah Kalimantan : Perspektif Pendidikan. *Cendekia*, 18(1), 72–88.
- Nofitasari, R., Siahaan, H. N., Sandra, I. K., Natgar, T., & Aritonang, B. (2025). Pengaruh fluktuasi harga pangan dan kontribusinya terhadap perubahan inflasi di kota medan Sumatera utara. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 2748(105).
- Nurafni, H., Rachmad, M. R., & Safri, M. (2021). Analisis determinan kemiskinan dan hubungannya dengan program pengentasannya Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi. 16(4), 689–704.
- Yasmine, S. M., & Badriah, L. S. (2025). Analisis Penilaian Kinerja Ekonomi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12.
- Yuvanda, S., Rachmad, M., Achmad, E., & Jakfar, J. (2025). Development of the Mainstay Food Industry Based on a Creative Economy. *Ianna Journal of Interdisciplinary Studies*, 7(2), 558–569.

<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15489909>

Yuvanda, S., Rachmad R, M., & Herlin, F. (2025). Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Ekonomi Daerah: Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, *14*(02), 525–532.

Yuvanda, S., Rachmad R, M., & Jakfar, M. (2025). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan*. Unja Publisher.